



**“Bidang 6: Rekayasa Sosial, Pengembangan Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat”**

**RASIONALITAS DALAM PILKADES SEDARAH (STUDI DI DESA  
PLIKEN KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS)**

**Tri Rini Widyastuti<sup>1</sup>, Wardiyono<sup>1</sup>, Suksmadi Sutoyo<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman**

Email: tri.widyastuti@unsoed.ac.id

**ABSTRAK**

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Banyumas 2019 mengungkap berbagai fakta menarik, salah satunya munculnya pasangan calon yang masih memiliki hubungan keluarga dekat (pilkades sedarah). Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mengulik lebih dalam di balik munculnya pilkades sedarah yang menampilkan pasangan calon kepala desa (kades) suami-istri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif dengan memilih Desa Pliken, Kecamatan Kembaran sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pliken masih mempertimbangkan penduduk asli sebagai salah satu kriteria memilih kades. Berdasarkan legenda desa, semua kades merupakan penduduk asli desa tersebut. Kades terpilih merupakan *incumbent* dan tidak memiliki “darah keturunan” kepala desa, namun keluarga besarnya tinggal di desa tersebut. Keluarga merupakan lumbung suara yang sangat solid dan potensial, meski tidak selalu demikian. Pada periode sebelumnya, Kades Pliken justru bersaing dengan kakak iparnya sendiri sehingga lumbung suara keluarga terpecah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya pasangan calon sedarah. Pertama, karena tidak ada lawan maka hal ini sebagai siasat menghindari peraturan yang melarang adanya calon tunggal. Kedua, istri dipilih sebagai “kompetitor” untuk mengurangi risiko pengkhianatan pihak lain yang dijadikan *bagongan* (lawan abal-abal), sekaligus untuk menekan biaya pencalonan. Andaiapun kalah dalam pertarungan, dia masih memiliki akses dan kontrol terhadap kekuasaan karena yang terpilih *tetep wonge dhewek*, yakni istri sendiri. Ketiga, rendahnya minat masyarakat mencalonkan diri sebagai kades tidak dapat dilepaskan dari pengalaman masa lalu dalam pemilihan kades yang menghabiskan biaya sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari satu milyar rupiah. Masyarakat Pliken yang kebanyakan pedagang selalu berhitung untung-rugi, dan menurut mereka menjadi kades tidak menguntungkan karena besarnya biaya pencalonan dan biaya sosial ekonomi selama menjabat *ora cucuk* dengan pendapatan resmi sebagai kades. Keempat, pamor kades petahana juga sangat tinggi sehingga calon-calon lain kalah sebelum bertanding. Kelima, karena kualitas kades petahana yang merupakan seorang sarjana. Keenam, ada program yang belum selesai sehingga masyarakat berharap calon petahana dapat melanjutkannya. Pilkades sedarah tidak selalu mencerminkan politik dinasti, ternyata rasionalitas masyarakat yang justru lebih mengemuka.

Kata kunci: pilkades sedarah, rasionalitas, Banyumas.

**ABSTRACT**

*The 2019 Banyumas Regency Simultaneous Village Head Elections (Pilkades) revealed various interesting facts, one of which was the emergence of pairs of candidates who still had close family ties*



*(pilkades by blood). This article is the result of research that delve deeper behind the emergence of in-breed Pilkades that featured husband-wife pairs of village head candidates. This research uses descriptive-qualitative research method by choosing Pliken Village, Kembaran District as the research location. The results showed that the people of Pliken Village still consider indigenous people as one of the criteria for choosing a village head. According to the village legend, all the village heads are natives of the village. The elected village head is an incumbent and does not have the "bloodline" of the village head, but his extended family lives in the village. The family is a very solid and potential source of voice, although that is not always the case. In the previous period, the Pliken village head actually competed with his own brother-in-law so that the family voice was divided. There are several factors that lead to the emergence of blood candidates. First, because there are no opponents, this is a strategy to avoid regulations that prohibit a single candidate. Second, the wife is chosen as a "competitor" to reduce the risk of betrayal by other parties who are made fake opponents, as well as to reduce the cost of candidacy. Even if he loses the battle, he still has access and control over power because the chosen one is his own wife. Third, the public's low interest in running for village head cannot be separated from past experiences in village head elections which cost very high costs, even reaching more than one billion rupiah. The Pliken people, who are mostly traders, always calculate the profit and loss, and according to them, being a village head is not profitable because of the high cost of nomination and the socio-economic costs during their tenure with the official income as village head. Fourth, the prestige of the incumbent village head is also very high so that other candidates lose before competing. Fifth, because of the quality of the incumbent village head who is a scholar. Sixth, there are programs that have not been completed so that people hope that incumbent candidates can continue. Pilkades by blood does not always reflect dynastic politics, it turns out that the rationality of the people is actually more prominent.*

*Key words: pilkades by blood, rationality, Banyumas.*

## **PENDAHULUAN**

Desa merupakan struktur pemerintahan terendah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Sebagai kesatuan sosial, desa memiliki tradisi pemilihan kepala desa yang terus mengalami perubahan seiring perjalanan waktu. Pemilihan kepala desa sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Pada masa VOC (*Vireenigde Ostindische Compagnie*) di Jawa sudah diadakan pemilihan kepala desa secara langsung oleh rakyat, meski pemilih hanya kalangan terbatas, seperti elite desa dan keturunan kepala desa sebelumnya. Zaman penjajahan Jepang pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung dengan cara setiap keluarga diwakili kepala keluarga (Maschab, 2013). Pada zaman kemerdekaan, terutama sejak lahirnya *Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Desa*, intervensi negara terhadap proses pemilihan kepala desa sangat kuat dengan tujuan menghasilkan pemimpin yang dapat menjadi kepanjangan tangan pemerintah (Astuti, dkk., 2019).

Lahirnya *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa* memberikan ruang bagi kembalinya otonomi dan demokrasi desa. Namun yang lebih menarik adalah lahirnya *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014* yang antara lain mengatur bahwa calon dalam pilkades sedikitnya dua orang calon dan sebanyak-banyaknya lima orang calon (Pasal 23). Peraturan tersebut secara tegas melarang adanya calon tunggal melawan kotak kosong. Dalam praktiknya adanya larangan tersebut memunculkan fenomena menarik dalam Pilkades Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Banyumas, yakni munculnya pasangan calon dalam kontestasi pilkades yang masih memiliki hubungan keluarga dekat. Dari 257 desa yang menyelenggarakan pilkades, terdapat sekitar lima persen calon yang masih memiliki ikatan keluarga<sup>3</sup>, baik pasangan suami-istri, bapak-anak, kakak-adik, maupun hubungan keluarga dekat lainnya (pilkades sedarah).<sup>4</sup> Munculnya fenomena pilkades sedarah menarik dikaji dalam perspektif sosiologi.

Kajian ini fokus pada analisis pilkades sedarah dengan mengacu pada satu rumusan masalah, yakni faktor-faktor yang menyebabkan munculnya pilkades sedarah. Peneliti berasumsi bahwa pilkades sedarah bukan



sekadar sebuah strategi menyasati aturan yang melarang calon tunggal, di baliknya ada rasionalitas para aktor yang terlibat di dalamnya. Pilkades sedarah juga menjadi penting dikaji karena dapat mengungkap praktik kontestasi semu yang meniadakan rivalitas yang merupakan spirit demokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran secara komprehensif tentang fenomena pilkades sedarah. Lokasi penelitian di Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yang dalam pilkades serentak tahun 2019 menampilkan pasangan suami istri sebagai kontestan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), FGD yakni pengumpulan data meminta tanggapan masyarakat (Bungin, 2001), dan studi dokumentasi guna menggali informasi terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya pasangan suami istri dalam kontestasi pilkades di desa tersebut. Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposif (*purposive sampling*), yakni memilih informan yang memiliki kriteria yang dibutuhkan penelitian ini (Harrison, 2007). Informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri kontestan pilkades, anggota BPD, panitia pilkades, para tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat lainnya. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (1992).

### **Kerangka Teoretik**

Munculnya pasangan suami-istri sebagai kandidat kepala desa tidak lepas dari tindakan sosial para aktor yang terlibat di dalamnya. Mengacu pada pemikiran Max Weber, tindakan yang dilakukan individu dalam hubungan sosialnya tidak terlepas dari proses pemikiran atau makna subjektif yang dibangun individu tersebut. Tindakan sosial merupakan suatu proses yang melibatkan aktor dalam pengambilan keputusan subjektif tentang sarana dan cara mencapai tujuan tertentu yang dipilih yang dibatasi oleh sistem kebudayaan dalam bentuk norma-norma, ide-ide, dan nilai-nilai sosial (Ritzer, 2007). Rasionalitas merupakan konsep dasar yang digunakan Weber dalam mengklasifikasikan tindakan sosial, namun Weber tidak menjelaskan lebih jauh tentang konsep rasionalitas tersebut. James Coleman melengkapi pemikiran Weber dengan mengembangkan teori pilihan rasional (*rational choice theory*).

Menurut Coleman, tindakan individu mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan tersebut (juga tindakan) diarahkan oleh nilai atau pilihan (preferensi) (Ritzer dan Goodman, 2005). Semua perilaku muncul dari individu yang berusaha mengejar kepentingannya sendiri dan interaksi yang terjadi merupakan sebuah pertukaran (Field, 2016). Individu dalam membuat pilihan rasional sangatlah individualistik karena dia hanya akan melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya berdasarkan berbagai pilihan yang tersedia tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Namun untuk mencapai kepentingannya, individu cenderung bekerja sama daripada berkompetisi. Ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Aktor merupakan individu yang memiliki pilihan guna mencapai tujuannya. Sumber daya merupakan semua hal yang dimiliki aktor untuk mencapai tujuannya, sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dikontrol oleh aktor. Para aktor dalam interaksi sosialnya saling bertukar sumber daya guna mencapai tujuan. Coleman melihat bahwa aktor atau sekumpulan aktor berkepentingan menyuruh aktor lain menginternalisasi norma (aturan) dan mengendalikan mereka. Melalui pemberian sanksi atau ancaman sanksi, norma memengaruhi tindakan individu (Ritzer dan Goodman, 2005). Perilaku para aktor yang terlibat dalam pilkades sedarah yang menampilkan kandidat calon kades pasangan suami-istri tidak terlepas pilihan rasional para pihak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Deskripsi Lokasi Penelitian**



## Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

Menurut sejarah, Desa Pliken sudah ada sejak tahun 1914, jauh sebelum Indonesia merdeka. Awalnya desa ini terdiri dari tiga desa, yakni Desa Pliken Lor, Desa Pliken Kidul, dan Desa Beber. Sebelum digabung pada 1914, warga ketiga desa ini sering terlibat permusuhan dengan saling adu kekuatan fisik menggunakan cambuk dan rotan. Mengatasi kondisi tersebut, atas kesepakatan warga desa ini kemudian dilebur menjadi satu dengan nama *Desa Pliken*.

Seperti umumnya desa-desa di Jawa, Desa Pliken memiliki sejarah panjang terkait pemilihan kepala desa. Sebagai mana yang tercatat dalam legenda desa, masyarakat Pliken telah melalui perjalanan panjang dalam memilih para pemimpinnya. Berikut ditampilkan silsilah kepemimpinan Desa Pliken.

Tabel 1. Silsilah Kepemimpinan Desa Pliken

No.	Nama	Periode	Lama menjabat	Keterangan
1.	H.Abu Mansyur	1914-1944	30 tahun	Kades pertama
2.	H. Mahfud	1944-1947	3 tahun	Putra kades I
3.	Satibi	1947-1948	1 tahun	Mati dibunuh
4.	Kuseri	1949-1961	22 tahun	
5.	H. Afandi	1962-1982	20 tahun	
6.	Toyibi	1983-1985	2 tahun	YMT
7.	Abu Mansyuri	1985-1997	12 tahun	Putra kades V
8.	Chaidir	1997-1998	1 tahun	YMT
9.	Kosim Suseno, BA	1999-2001	2 tahun	
10.	Achmad Sucipto	2001-2002	1 tahun	YMT
11.	Achmad Budi S.	2003-2007	4 tahun	
12.	Supardo	2007-2013	6 tahun	
13.	Harjito, SH	2013-skrng	9 tahun	Adik ipar kades XII

Sumber: Dokumen RPJMDes Desa Pliken Kec. Kembaran 2019-2025, diolah

Mengacu data di atas, selama lebih seabad perjalanan sejarahnya, Desa Pliken telah mengalami tiga belas kali pergantian kepemimpinan dan kesemuanya penduduk asli Pliken. Kepala desa pertama adalah H. Abu Mansyur, yang bersama-sama rakyat melawan penjajah Belanda. Kepala desa kedua dijabat H. Mahfud, putra kades pertama, yang sebelumnya adalah seorang *bau*. Tahun 1947 dilakukan pemilihan kepala desa dan terpilih Satibi, yang hanya menjabat selama satu tahun karena mati dibunuh akibat dituduh dekat dengan Belanda. Tahun 1949 diadakan pilkades dan terpilih Kuseri yang menjabat hingga meninggal dunia tahun 1961. Sebelum menjadi kades, beliau juga menjabat sebagai *bau*. Tahun 1962 diadakan pilkades yang diikuti 12 kandidat dan terpilih H. Afandi dan menjabat hingga meninggal tahun 1982. Tahun 1983-1985 jabatan kepala desa *lowong* dan tugas-tugas kepala desa dilaksanakan oleh Toyibi selaku yang menjalankan tugas (YMT) kepala desa. Tahun 1985 hingga 1997 jabatan kepala desa diampu Abu Mansyuri, putra H. Afandi, yang berhasil mengalahkan empat kandidat lainnya. Tahun 1998, Bapak Chaidir Yushari ditunjuk menjadi YMT kepala desa. Tahun 1999 diadakan pilkades dan terpilih Kosim Suseno Aji, BA terpilih mengalahkan tiga calon kepala desa lainnya. Tahun 2001 sampai 2002, Kepala Desa Pliken diduduki Achmad Sucipto selaku YMT kepala desa. Tahun 2003, Achmad Budi Santosa terpilih menjadi kepala desa mengalahkan satu calon. Tahun 2007 terjadi peristiwa menarik karena pilkades diikuti dua orang calon yang merupakan pasangan suami istri, padahal pada masa itu belum ada aturan yang melarang calon tunggal. Lebih menariknya lagi, perolehan suara istri tidak berbeda jauh dari sang suami, Supardo. Tahun 2013 terjadi pilkades yang cukup dramatis yang diikuti tiga orang calon. Salah satu penantang petahana adalah adik iparnya sendiri, Harjito, SH, yang kemudian terpilih menjadi



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"*

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

---

kepala desa. Tahun 2019 dilakukan pilkades lagi, namun hingga hari terakhir pendaftaran tidak ada calon penantang yang mendaftar sehingga istri calon petahana dimajukan sebagai kompetitor.

Desa Pliken terletak di sebelah timur Purwokerto, ibu kota Kabupaten Banyumas. Desa ini di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kembaran dan Desa Bojongsari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Purwodadi dan Desa Lemberang, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sokaraja Lor dan Desa Kedondong, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Ledug. Luas desa ini adalah 346,765 hektar (ha) dengan rincian penggunaan lahan sebagai berikut: sawah (256,440 ha); ladang/perkebunan (2,450 ha); kolam ikan/empang (14 ha); pemukiman/perumahan (69,875 ha); dan kuburan (4 ha).

Desa Pliken terdiri dari lima grumbul yang terbagi ke dalam lima dusun, sembilan rukun warga (RW) dan 50 rukun tetangga (RT). Jumlah penduduk sebanyak 9.007 jiwa dan jumlah kepala keluarga (KK) sebanyak 2.750 KK. Hampir seluruh penduduk Desa Pliken menganut agama Islam, hanya lima orang yang menganut agama Kristen.

Tingkat pendidikan penduduk Desa Pliken relatif masih rendah. Sebanyak 1.910 orang berpendidikan sekolah dasar (SD) atau tidak tamat SMP; sebanyak 1.395 orang berpendidikan SMP atau tidak lulus SMA; sebanyak 791 orang tamat SMA; sebanyak 182 orang lulus perguruan tinggi (D1, D2, D3, S1, dan S2). Adapun sisanya tidak tamat sekolah dasar, masih sekolah dasar, dan belum sekolah. Fasilitas pendidikan yang tersedia adalah sekolah dasar empat buah, *madrasah ibtidaiyah* (MI) satu buah, dan taman kanak-kanak (TK) lima buah. Fasilitas keagamaan meliputi tujuh buah masjid dan 36 musola, serta satu buah fasilitas kesehatan puskesmas pembantu.

### **Faktor-faktor Pendukung Munculnya Pilkades Sedarah di Desa Pliken**

Berbeda dari aturan pilkades sebelumnya yang membolehkan calon kades melawan kotak kosong, aturan baru mewajibkan dalam pilkades para calon memiliki lawan. Ketika pilkades hanya diikuti satu calon, maka calon yang bersangkutan dipaksa aturan mencari kompetitor. Pilihan paling rasional adalah dengan mengajukan keluarga sendiri sebagai "pesaing."

Menyiasati aturan tersebut banyak calon kepala desa yang tidak memiliki lawan akhirnya mengusung keluarga sendiri karena tidak ada larangan adanya calon yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Salah satu desa yang menyelenggarakan pilkades sedarah adalah Desa Pliken yang mengusung pasangan calon suami-istri, yakni Harjito, SH dengan nomor urut 02 dan istrinya, Widyastuti, dengan nomor urut 01. Menurut catatan panitia, ada 6.716 orang yang terdaftar sebagai pemilih yang dilayani dalam 7 tempat pemungutan suara (TPS) dan satu TPS khusus orang sakit. Berikut temuan di lapangan terkait penyebab munculnya pilkades sedarah.

Menurut penuturan Hikmatul Kodir, selaku panitia penyelenggara pilkades Desa Pliken, saat hari terakhir pendaftaran tanggal 8 Juli 2019, tidak ada calon lain yang mendaftar sehingga diputuskan istri calon kades petahana yang dijadikan rival, daripada tidak ada lawan. Sesuai aturan, apabila sampai penutupan pendaftaran hanya ada satu calon maka pilkades harus dibatalkan. Majunya istri calon petahana sekadar upaya menyiasati aturan dikuatkan oleh penuturan Gunawan, Ketua BPD Desa Pliken, berikut ini.

"Sebelumnya saya mau cerita bahwa antusiasme warga Desa Pliken dalam Pilkades 2019 sangat tinggi, hampir 90 persen, tepatnya 89,9 persen. Artinya, masyarakat sangat peduli dalam memilih pemimpin. Sebenarnya hanya ada "calon tunggal" meski secara administratif istri si calon ikut maju. Itu sekadar menyiasati peraturan yang melarang calon tunggal."

Keputusan yang diambil para pihak yang terlibat dalam pilkades untuk setuju mengajukan istri calon kades petahana sebagai rival merupakan pilihan rasional. Bagi panitia pilkades, keputusan tersebut dapat menyelamatkan dana dan tenaga yang telah dikeluarkan untuk mempersiapkan pilkades. Bagi calon kades petahana, mengusung istri sendiri sebagai lawan jelas memperbesar peluang menang, sekaligus mengurangi risiko pengkhinatan daripada jika dia mengajukan "orang lain" sebagai rival. Bagi istri petahana, "menyelamatkan" pilkades dengan mengajukan diri sebagai calon menyelesaikan banyak persoalan. Masyarakat sendiri merasa tidak keberatan dengan majunya "calon abal-abal," sebab apabila pilkades ditunda maka kepemimpinan desa dijalankan oleh yang menjalankan tugas (YMT) kepala desa



yang memiliki kewenangan terbatas. Dengan kewenangan terbatas kemungkinan akan ada layanan masyarakat yang tidak dapat diberikan secara optimal.

Masyarakat desa - yang ibarat hidup di kolam sempit – saling mengenal hampir setiap warganya. Hal ini antara lain disebabkan intensitas interaksi antarwarga yang relatif lebih tinggi dibanding masyarakat kota. Oleh karena itu, masyarakat desa cenderung mengenal dengan baik para pemimpin desa mereka. Dalam hampir semua pilkades sedarah, salah satu kandidat yang ikut bertarung adalah petahana (*incumbent*). Kuatnya posisi petahana membuat tidak ada calon penantang yang berani mengajukan diri. Banyak variabel yang membuat calon petahana begitu perkasa, salah satunya adalah faktor pribadi sang calon. Dalam sesi *focussed group discussion* (FGD) yang diikuti unsur BPD, PKK, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan panitia pilkades di Desa Pliken, terungkap bahwa calon petahana memang secara pribadi memiliki banyak keunggulan. Berikut penuturan beberapa peserta FGD.

".....pamor kades sekarang (Harjito, SH. pen.) sangat tinggi sehingga calon-calon lain pada kalah sebelum bertanding, tidak ada yang berani mencalonkan diri."

"...karena kualitas calon. Dia berpendidikan S1, sarjana hukum."

"Prestasi kades sekarang antara lain prestasi dalam pembangunan fisik, juga dalam penanganan covid. Desa Pliken pernah mewakili Provinsi Jawa Tengah dalam lomba "Siaga Candi" yang diadakan oleh Kepolisian RI. Pak Kades juga sukses menangani *stunting*, program vaksinasi Covid-19 bagi lansia dengan *comorbid*..."

Penuturan para peserta FGD ini mengindikasikan bahwa calon petahana memang memiliki kualifikasi seorang pemimpin sehingga layak didukung dan dipertahankan. Dalam masa kepemimpinannya yang mengusung visi "*Desa Pliken Kecamatan Kembaran berusaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terpenuhi kebutuhan dasar secara adil dan transparan, yang didukung dengan pemerintahan yang baik, aparat yang bersih dengan tetap mempertahankan budaya lokal,*" banyak kemajuan yang telah dicapai. Sebuah keputusan rasional jika masyarakat tetap mendukungnya menjadi kepala desa.

Pemilihan kepala desa membutuhkan dana yang relatif besar, ratusan juta hingga milyaran rupiah. Oleh karena itu, kemampuan ekonomi kandidat menjadi prasyarat tak tertulis untuk mencalonkan diri sebagai kades. Dalam FGD terungkap bahwa biaya menjadi kades di Desa Pliken sangat tinggi.

"Biaya mencalonkan diri jadi kades di Pliken sangat tinggi. Kalau cuma punya uang 200 juta *gak* bakal jadi. *Nyalon* kades itu seperti orang *mbarang gawe* (punya hajat, pen.) tiga bulan. Sebulan sebelum pilkades sudah banyak tamu berkunjung dan harus dijamu sehingga minat masyarakat mencalonkan diri berkurang. Apalagi masyarakat sini kan kebanyakan jadi pedagang, jadi hitung-hitungannya untung-rugi."

"Pemilih di sini jumlahnya banyak, sekitar 7.000-an. Jika seorang pemilih dikasih Rp 20.000 saja sudah habis 140 juta. Belum pengeluaran yang lain..."

"Pada periode pertama (Harjito, pen.) habis lebih dari 700 juta. Calon yang *gak* jadi (Supardo, kades petahana, pen) pada saat itu malah habisnya lebih dari satu milyar."

Biaya pemilihan kepala desa yang tinggi menyebabkan hanya calon yang memiliki kemampuan ekonomi besar yang berani mencalonkan diri. Mengingat hal itu, tidak mengherankan apabila tidak ada calon yang berani menantang petahana. Selain biaya pencalonan tinggi, peluang menang juga sangat kecil. Meskipun para calon kades dilarang memberikan apapun kepada para calon pemilih, namun dalam praktik penyelenggaraan pilkades hal ini lumrah terjadi. Berikut pernyataan beberapa informan.

"Sesuai aturan, para calon kades dilarang memberikan apa pun kepada para calon pemilih, dalam bentuk apa pun dilarang. Jika terbukti bisa dituntut, dibuatkan BAP bahwa terjadi pelanggaran. Tapi kenyataannya di masyarakat tidak dapat menghindari hal seperti itu. Yang memberi *wuwur* tidak mengaku, yang diberi *wuwur* pun tidak bakal mengaku karena menurut aturan, baik yang memberi maupun yang menerima *wuwur* dapat dituntut. Biasanya *wuwur* diberikan tidak secara langsung oleh calon kades tapi melalui orang lain. Istilahnya ada sistem yang tersembunyi..."



## Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

"Jika calonnya lebih dari satu, yang *ngasih* uang paling besar yang akan dipilih sehingga semua calon *oncor-oncoran*. Jika ada tiga calon dan satu keluarga ada tiga orang yang berhak misalnya, mereka memecah dukungan agar dapat uang dari ketiga calon. Perkara di bilik pemungutan suara ya siapa yang tahu. Tapi biasanya yang paling besar *ngasih wuwur* yang dipilih."

Bagi Harjito, pilkades 2019 merupakan pencalonannya yang kedua. Pada periode pertama, dia menghabiskan dana hingga 700 juta, jumlah yang sangat besar. Lawannya, yang merupakan kakak iparnya sendiri, bahkan menghabiskan dana lebih dari satu milyar, dan kalah. Pada periode kedua, beliau mengaku menghabiskan dana sekitar 350 juta. Sebagai petahana yang tidak memiliki lawan, seharusnya lebih mudah baginya untuk tidak memberikan "sesuatu" kepada para pemilih. Namun ada "norma" yang memaksanya tetap melakukan hal itu. Berikut penuturan kades terpilih ketika ditanya alasannya tetap memberikan "tali asih" meskipun yang menjadi "lawan" adalah istri sendiri dan pasti menang.

"Sebetulnya pada pilkades kemarin (periode kedua, pen.) saya ingin memulai tradisi baru sehingga untuk menjadi kades orang tidak perlu keluar uang banyak. Tapi masyarakat susah, kalau tidak ada sesuatu mereka enggan memilih. Ada kecemasan dari panitia, jika masyarakat tidak memperoleh sesuatu – katakanlah tali asih – dikhawatirkan mereka tidak mau datang mencoblos. Padahal jika yang datang kurang dari 50% + 1 maka pilkades dianggap gugur, padahal mereka sudah menggunakan dana dari kabupaten. Oleh karena itu, panitia tetap bersikeras meminta saya memberikan tali asih meskipun lawan saya istri sendiri. Saya orang hukum sehingga tahu kalau saya memberikan sesuatu kepada calon pemilih saya maka saya dianggap melanggar hukum dan bisa dituntut sehingga saya memberikannya setelah mereka memilih sebagai bentuk *tasyakuran*, itu pun di luar lapangan (tempat pemilihan, pen.). Seminggu sebelum pilkades saya bahkan belum "membuka pintu." H-1 saya belum memberikan apa-apa. Masyarakat pada komentar macam-macam, "*Lurahe ora gelem ngetokna dhuwit*," (lurah tidak mau keluar duit, pen.) "*Genahe lurahe duwe dhuwit apa ora sih?* (sebenarnya lurah punya duit apa tidak sih?, pen.)" Saya memberikan tali asih setelah pemilihan sebagai bentuk *tasyakuran*. Mengubah *mind set* masyarakat (terkait *wuwur*) jika calonnya lebih dari satu sangat sulit, baik itu di pilkades, pilkada, pileg... Meski pesaing saya istri sendiri tapi kekhawatiran pilkades gagal tetap ada. Manusiawi lah..."

Sudah seperti aturan tak tertulis bahwa dalam pilkades setiap calon kepala desa memberikan "sesuatu" kepada para pemilih, bahkan masyarakat memandangnya sebagai sebuah keharusan. Mengikuti pemikiran Coleman, "norma" ini tetap dipertahankan oleh para aktor yang memperoleh keuntungan dari norma tersebut. Sekumpulan aktor, dalam hal ini masyarakat yang diwakili panitia pilkades, berusaha mengendalikan aktor lain, dalam hal ini kades terpilih, dengan mengingatkan norma yang ada dalam masyarakat tentang keharusan memberikan sesuatu kepada masyarakat yang telah memilihnya. Norma melalui pemberian sanksi atau ancaman pemberian sanksi memengaruhi tindakan individu (kades terpilih) untuk memberikan tali asih. Masyarakat "mengancam" jika tidak diberi sesuatu mereka tidak akan datang memilih. Apabila jumlah pemilih kurang dari 50%+1 maka pilkades dianggap tidak sah. Tindakan masyarakat adalah rasional karena dengan cara itu mereka memperoleh sesuatu yang menguntungkan dirinya (tali asih). Bagi kades terpilih, memberikan sesuatu juga sebuah pilihan rasional karena dengan cara itu jumlah pemilih yang datang dapat memenuhi syarat sahnya pilkades.

Menurut perhitungan ekonomi menjadi kepala desa pasti rugi, namun "sihir" pilkades ini tetap memukau banyak orang. Beban sosial ekonomi menjadi kades sangat berat, baik selama pencalonan maupun selama menjabat sebagai kades. Beban yang berat ini tidak sebanding dengan penghasilan resmi seorang kades. Oleh karena itu, orang cenderung bertindak rasional, menolak mencalonkan diri terutama melawan kades petahana, seperti yang tergambar dalam pernyataan peserta FGD Desa Pliken berikut ini.

"Secara mabidangtika menjadi kades rugi, tapi secara spiritual "wah." *Paling ora wis dadi wong penting nang desa* (paling tidak sudah pernah jadi orang penting di desa, pen.). Pengeluaran ketika *nyalon* jauh dari pendapatan resmi."

"Yang dikejar jabatan kepala desa karena "wah" tadi..."



"Kondangan akeh, nek ana kematian kudu teka, durung acara-acara sosial liyane... jane akeh rugine.... (undangan hajatan banyak, kalau ada warga yang meninggal harus datang, belum lagi acara sosial lainnya... sebenarnya banyak ruginya, pen.). Mayoritas orang Pliken pedagang, selalu menghitung untung-rugi secara materi. Makanya mereka tidak mau mencalonkan diri jadi kades."

Masyarakat yang menolak mencalonkan diri mengambil keputusan rasional karena antara peluang menang dan keuntungan yang didapat tidak seimbang. Biaya pilkades yang tinggi dengan peluang menang tipis, sementara secara ekonomi pendapatan sebagai kades tidak sepadan, maka wajar jika tidak ada calon yang berani melawan petahana, sebuah keputusan yang rasional. Namun menjadi kades tidak melulu menggunakan pertimbangan ekonomi, ada aspek lain yang membuat status kades masih menjadi incaran, yakni persoalan gengsi, kehormatan, dan harga diri, bukan hanya untuk dia semata tapi juga bagi keluarga besarnya. Oleh karena itu, keputusan mencalonkan diri menjadi kades tetap merupakan pilihan rasional bagi pelakunya, meskipun rasionalitas berorientasi nilai.

Mengapa memilih "lawan" dari keluarga sendiri? Selain dalam rangka menyiasati aturan yang melarang adanya calon tunggal, pilkades sedarah juga dipilih guna meminimalisasi biaya pencalonan kepala desa sekaligus mengurangi risiko jika harus menunjuk orang lain sebagai kompetitor pengganti kotak kosong, karena bisa jadi dia yang menang. Berikut penuturan seorang informan.

"Mengapa memilih istri sendiri sebagai kompetitor? Kok bukan orang lain yang dijadikan *bagongan*?<sup>5</sup> Jika milih *bagongan* orang lain dikhawatirkan yang jadi malah *bagongan*-nya... Pernah kejadian seperti itu. Yang namanya milih tidak selalu demi pembangunan, tapi bisa jadi milih justru untuk menghancurkan, ya ada... Contohnya, yang dipilih malah *bagongan*-nya... *Istilahe sing masang tratag sapa sing dadi sapa* (menggambarkan calon yang 'sesungguhnya' justru kalah dalam pemilihan, pen.)..."

Biasanya yang dijadikan lawan adalah pihak yang dianggap subordinat seperti istri, anak, adik, keponakan, dsb. Di Desa Pliken "pesaingnya" adalah istri sendiri. Hasil penelitian Astuti, dkk. (2019), dalam kasus sang calon tunggal memilih istri sebagai "kompetitor," hal ini karena alasan superioritas dan supremasi laki-laki yang tidak memandang penting posisi perempuan. Di Desa Pliken, bahkan si istri memosisikan diri sebagai subordinat karena dalam setiap kampanye beliau selalu berpesan, "*Jangan pilih saya ya...!*"

Berbeda dari asumsi awal peneliti, temuan di lapangan menunjukkan bahwa dinasti politik tidak tampak berperan dalam pilkades sedarah di Desa Pliken. Apabila melacak silsilah kepala desa yang pernah berkuasa di desa tersebut, memang ada beberapa mantan kades yang "menurunkan kekuasaannya" kepada anak. Namun kades yang saat ini berkuasa tidak memiliki *trah lurah*, bahkan dia pernah melawan kakak iparnya sendiri ketika berkontestasi pada periode sebelumnya. Munculnya pilkades sedarah lebih dikarenakan alasan pragmatis dan rasional, yakni menyiasati larangan calon tunggal; melawan petahana yang berprestasi sangat sulit; tingginya biaya politik dalam pilkades; perhitungan untung-rugi.

Memilih lawan bertarung dari keluarga sendiri merupakan sebuah strategi mengurangi biaya pencalonan yang sangat tinggi. Jika yang menjadi lawan keluarga sendiri setidaknya para calon tidak perlu *oncor-oncoran* (bersaing mengungguli lawan) dalam mengeluarkan dana. Memilih pesaing dari keluarga sendiri sekaligus juga untuk menghindari risiko penghianatan pihak lawan. Seandainya sang kompetitor *bagongan* yang justru terpilih, setidaknya dia (kades petahana) masih memiliki akses dan kontrol terhadap kekuasaan di desa karena yang menjadi kades tetap *wonge dhewek* (orang sendiri).

## KESIMPULAN

---

<sup>5</sup> *Bagongan* adalah istilah lokal untuk menyebut seseorang yang dijadikan "lawan semu" dalam sebuah kompetisi yang mengharuskan adanya lawan tanding. Dalam pilkades, *bagongan* diadakan sekadar untuk menyiasati peraturan yang melarang adanya calon kades tunggal. Biasanya yang dijadikan *bagongan* adalah orang yang dianggap lemah/tidak penting sehingga tidak mengancam kemenangan calon sesungguhnya.



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

Mengangkat “pesaing” dari keluarga sendiri tentu saja merupakan sebuah pilihan yang rasional. Pertama, bagi pasangan calon, cara ini bisa jadi dapat mengurangi biaya politik karena yang menjadi pesaing adalah keluarga sendiri sehingga tidak perlu *borong-borong* bersaing dalam menarik calon pemilih. Kedua, dengan mengangkat keluarga sendiri kemungkinan sang “kompetitor” berkhianat kecil karena *blood is thicker than water*.<sup>6</sup> Ketiga, andaipun si calon (biasanya petahana) kalah dalam pilkades, yang menang tetap “*wonge dhewek*” sehingga dia tetap memiliki akses dan kontrol terhadap kekuasaan. Di sisi masyarakat, pilkades sedarah juga memiliki sisi positif, antara lain meminimalisasi potensi konflik yang biasanya muncul mengiringi pilkades. Bagi panitia pemilihan, adanya calon sedarah juga membuat pekerjaan mereka lebih mudah, paling tidak hal ini menutup adanya potensi ketidakpuasan dari pihak yang kalah. Namun demikian, pilkades sedarah meniadakan kompetisi sejati yang sesungguhnya menjadi spirit demokrasi. Pada awalnya peneliti berasumsi bahwa fenomena pilkades sedarah secara jelas mengindikasikan kuatnya dinasti politik sehingga tidak ada kompetitor yang berani melawan petahana. Namun temuan di lapangan menunjukkan hal berbeda. Alasan rasionalitas yang lebih mengemuka.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM Unsoed yang telah membiayai penelitian ini melalui skim penelitian Riset Dasar Unsoed (RDU).

## **DAFTAR PUSTAKA**

Astuti, Puji, Sulistyowati, Lusiana Astrina. 2017. “Kontertasi Pasangan Susmi Istri dalam Pilkades.” *Jurnal Politik Wali Songo*. Vol. 1 No. 1. 2019. ISSN: 2503-3190 (p); 2503-3204 (e). DOI: 10.21580/jpw.2019.1.1.2338.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Field, John. 2016. *Modal Sosial*. Yogyakarta. Kreasi Wacana.

Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Alih Bahasa Tri Wibowo, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta; Gajah Mada Press.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Alih bahasa Alimandan. Jakarta. Kencana.

Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Alih bahasa Alimandan. Jakarta. PT. Raja Grafindo Perkasa.

-----2019. *RPJMDes Desa Pliken Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Tahun 2019-2025*.

Tribun Jateng.com. 2019. Senin, 22 Juli 2019 16:46 <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/22/pasutri-ini-bakal-bertarung-rebutkan-kursi-tingkat-des-pilkades-serentak-banyumas-digelar-besok> diakses 28 November 2020.

---

<sup>6</sup> Dalam tradisi politik kekerabatan, ada ungkapan darah lebih kental daripada air. Artinya, ikatan keluarga lebih kuat daripada hubungan yang lain. Pola relasi politik kekerabatan jauh lebih kuat, solid, dan tangguh sebagaimana dilambangkan darah yang kental. Ini berbeda dari pola relasi politik yang bersifat kontraktual fungsional atas dasar kesamaan kepentingan, yang seperti halnya air, pola relasi ini gampang mencair dan memudar.